

**POLITIK PENGETAHUAN KOLONIAL DALAM RELASI GURU DAN MURID
DI HINDIA BELANDA: HUBUNGAN SNOUCK HURGRONJE DAN
HOESEIN DJAJADININGRAT**

*Colonial Knowledge Politics in Teacher–Student Relations in the Dutch Indies:
The Relationship between Snouck Hurgronje and Hoesein Djajadiningrat*

Mohammad Refi Omar Ar Razy

Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Kota Surabaya, 60231, Indonesia
Pos-el: mohammadrazy@unesa.ac.id

Naskah diterima: 9 Februari 2026 - Revisi terakhir: 20 Mei 2026

Disetujui terbit: 21 Mei 2026 - Terbit: 10 Juni 2026

Abstract

This article examines the politics of colonial knowledge through the teacher and student relationship in the Dutch Indies, with particular focus on the relationship between Snouck Hurgronje and Hoesein Djajadiningrat. The study aims to analyze Snouck's motives in maintaining a long-term relationship with his indigenous student, to identify the personal dimensions that extended beyond formal academic ties, and to explain how this relationship shaped Hoesein's intellectual orientation and career trajectory. This study draws on correspondence between Snouck and Hoesein from 1913 to 1935, correspondence between Mangkoenagoro VII and Snouck, and several articles published in Djåwå magazine. The findings indicate that their relationship was not neutral, but rather functioned as an important mechanism in the production, validation, and circulation of colonial knowledge. This relationship was sustained not only through academic supervision, but also through personal closeness, financial patronage, and symbolic recognition, all of which strengthened intellectual loyalty. Hoesein's transition from an academic path to the colonial bureaucracy reveals the ambivalence of colonial education: while the system succeeded in producing an educated indigenous elite, it failed to fully control how that knowledge was later used. This article concludes that colonial education functioned as a social system in which knowledge, power, and emotion were intertwined in shaping the modern indigenous elite. Thus, this study demonstrates that colonialism operated not only through political and bureaucratic domination, but also through affective mechanisms that shaped obedience, loyalty, and ambivalence among indigenous elites within the colonial structure of power.

Keywords: *Knowledge politics; Colonialism; Teacher–student relations; Snouck Hurgronje; Hoesein Djajadiningrat*

Abstrak

Artikel ini mengkaji politik pengetahuan kolonial melalui relasi guru dan murid di Hindia Belanda dengan menempatkan hubungan antara Snouck Hurgronje dan Hoesein Djajadiningrat sebagai fokus utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis motif Snouck dalam mempertahankan hubungan jangka panjang dengan murid pribuminya, mengidentifikasi dimensi personal yang melampaui ikatan akademik formal, serta

menjelaskan bagaimana hubungan tersebut membentuk orientasi intelektual dan trajektori karier Hoesein. Penelitian ini menggunakan surat-menyurat antara Snouck dan Hoesein pada periode 1913–1935, korespondensi antara Mangkoenagoro VII dengan Snouck dan beberapa artikel yang termuat dalam majalah Djâwâ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak bersifat netral, melainkan menjadi mekanisme penting dalam produksi, validasi, dan sirkulasi pengetahuan kolonial. Relasi tersebut dipertahankan bukan hanya melalui bimbingan akademik, tetapi juga melalui kedekatan personal, patronase finansial, dan pengakuan simbolik yang memperkuat loyalitas intelektual. Peralihan Hoesein dari jalur akademik ke birokrasi kolonial memperlihatkan ambivalensi pendidikan kolonial: sistem ini berhasil melahirkan elite pribumi terdidik, tetapi gagal sepenuhnya mengendalikan bagaimana pengetahuan itu kemudian digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan kolonial berfungsi sebagai sistem sosial tempat pengetahuan, kekuasaan, dan emosi saling berkelindan dalam membentuk elite pribumi modern. Dengan demikian, studi ini memperlihatkan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya melalui dominasi politik dan birokrasi, tetapi juga melalui mekanisme afektif yang membentuk kepatuhan, loyalitas, dan ambivalensi elite pribumi di dalam struktur kekuasaan kolonial.

Kata kunci: Politik pengetahuan; Kolonial; Guru-Murid; Snouck Hurgronje; Hoesein Djajadiningrat

PENDAHULUAN

Relasi guru dan murid dalam konteks kolonial tidak pernah netral, melainkan berlangsung dalam struktur kuasa yang timpang. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen kolonial untuk membentuk loyalitas, cara pandang, dan orientasi intelektual elite pribumi (Suwignyo, 2012; 2013), sejalan dengan Foucault (1972, 17), pengetahuan diproduksi dalam relasi kuasa tertentu; dalam Hindia Belanda, ia terhubung dengan politik etis dan misi pemberadaban (Goss, 2011). Melalui pendidikan Barat, kolonialisme berupaya membentuk elite pribumi yang menginternalisasi nilai dan habitus Eropa (Fanon 1964, 101). Akibatnya, relasi akademik antara sarjana Eropa dan murid pribumi menjadi praktik politik pengetahuan kolonial (Kuitenbrouwer 2013, 34).

Acapkali, posisi ini justru menempatkan elite pribumi terdidik pada situasi yang ambivalen (Bhabha 2004, 45). Mereka tidak sepenuhnya diakui sebagai bagian dari masyarakat Eropa, tetapi pada saat yang sama juga kerap dipandang terpisah dari komunitas pribuminya sendiri (Lomba 2005, 267). Hal semacam ini pernah ditemui dalam diri Raden Saleh ketika ia berhadapan dengan rasa ambiguitas ketika kembali ke Hindia Belanda setelah perjalanan melukisnya di sejumlah wilayah Eropa seperti Belanda, Perancis, dan Jerman (Carey 2022, 89). Relasi akademik yang terbangun antara sarjana Eropa dan murid pribumi dengan demikian tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan

sarat dengan proses negosiasi, resistensi halus, dan upaya artikulasi diri yang terus-menerus. Pribumi sebagai subjek berusaha memaknai ulang pengetahuan kolonial sesuai dengan pengalaman historis dan posisi sosialnya sendiri.

Kerangka teoretis ini memberikan landasan analitis untuk membaca relasi konkret antara aktor kolonial dan elite pribumi terdidik dalam praktik sejarah yang spesifik. Hubungan antara Snouck Hurgronje, seorang orientalis terkemuka sekaligus penasihat utama pemerintah kolonial, dan Hoesein Djajadiningrat, intelektual pribumi awal abad ke-20, merupakan contoh nyata dari praktik tersebut, khususnya dalam bentuk relasi pedagogis yang bersifat formal maupun informal (Doel 2023, 25; Burhanudin 2014, 31; Laffan 2015, 44). Relasi ini mulai terbangun sejak kunjungan Snouck ke Banten pada akhir abad ke-19, ketika ia menjalin kontak awal dengan lingkungan keluarga Djajadiningrat melalui pertemuannya dengan Raden Djajawinata, Bupati Serang, sekaligus ayah Hoesein.

Raden Djajawinata sebagaimana yang dijelaskan dalam memoar Achmad Djajadiningrat (1936, 3) memiliki visi progresif tentang pentingnya pendidikan Eropa bagi anak-anaknya sebagai strategi menghadapi kolonialisme. Ia mendorong Achmad, Hoesein, dan Loekman menempuh pendidikan Barat. Awalnya, Snouck Hurgronje menaruh harapan pada Achmad sebagai mitra politik asosiasi, tetapi setelah Achmad menjadi bupati, perhatian beralih kepada Hoesein atas rekomendasinya.¹ Seleksi elite pribumi ini berlangsung strategis dalam kerangka kepentingan kolonial (Sutherland, 2021, 63). Hoesein kemudian belajar di Hoogere Burger School di Batavia dan melanjutkan studi bahasa Melayu di Universitas Leiden (1905–1913) di bawah bimbingan Snouck (Pijper 1961, 402–3).

Sekembalinya ke Hindia Belanda (1913), relasi pedagogis itu bertransformasi

¹Achmad sebenarnya sempat berencana melanjutkan pendidikan ke Belanda, bahkan keberangkatannya telah menjadi bagian dari harapan keluarga untuk meningkatkan posisi sosial dan intelektualnya (Djajadiningrat, 1936, hlm. 19). Namun, rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena keluarganya menghadapi keterbatasan ekonomi. Orang tuanya berusaha mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada seorang saudagar Arab di Serang, tetapi usaha itu tidak berhasil. Situasi keluarga semakin berat setelah ayah Achmad meninggal dunia, sehingga ia harus mempertimbangkan kembali rencana pendidikannya. Sebagai anak yang memiliki tanggung jawab terhadap banyak saudaranya, Achmad akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke Leiden. Setelah batal berangkat ke Belanda, Achmad mulai menempuh jalan karier di lingkungan pemerintahan kolonial dengan menjadi juru tulis di Serang. Pengalaman bekerja dalam struktur birokrasi inilah yang kemudian membuka peluang baginya untuk naik secara bertahap hingga akhirnya memperoleh kedudukan sebagai bupati.

menjadi jaringan intelektual kolonial yang berkelanjutan. Snouck tetap menjadi rujukan epistemik, sementara Hoesein menerapkan pengetahuan Barat dalam riset, birokrasi, dan produksi pengetahuan kolonial termasuk konsultasinya tentang penelitian batu nisan Sultan Aceh (Tjandrasasmita 2009, 56). Bahkan, hubungan mereka meluas ke ranah personal. Kesenambungan ini menunjukkan bahwa pendidikan kolonial berfungsi sebagai mekanisme jangka panjang untuk menjaga stabilitas epistemik dan loyalitas intelektual dalam tatanan kolonial.

Pada titik inilah hubungan Snouck dengan Hoesein perlu dibaca dalam satu ekosistem politik pengetahuan yang lebih luas, bersama jaringan informan pribumi Snouck lainnya, seperti Hasan Mustapa, Aboe Bakar Djajadiningrat, dan Sayyid Uthman (lihat Razy, Munigar, dan Ma'mur 2024; Rohmana 2016; Jahroni 1999; Rohmana 2016; Rohmana 2021; Millie 2017; Kaptein 1998; 1997; 2014; Laffan 1999; 2003). Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas relasi Snouck dengan para tokoh tersebut dalam kerangka hubungan peneliti–informan atau kolaborasi keilmuan individual. Namun, pendekatan ini jarang mengaitkan jaringan informan tersebut dengan relasi pedagogis formal ataupun informal antara Snouck dan Hoesein sebagai bagian dari satu sistem produksi dan reproduksi pengetahuan kolonial (Razy, Sofianto, dan Jaelani 2022, 2023; Razy 2023; Razy 2025). Padahal, perbedaan posisi antara informan lokal dan murid terdidik justru memperlihatkan variasi peran pribumi dalam struktur pengetahuan kolonial yang sama. Kajian tentang relasi guru–murid kolonial di Indonesia masih jarang menggunakan kerangka politik pengetahuan secara komparatif dan struktural. Hubungan seperti Amir Sjarifoeddin–J.M.J Schepper atau Soekarno–C.W.P Schoemaker umumnya dibahas dalam narasi biografis atau nasionalis, tanpa menempatkannya dalam analisis sistemik mengenai reproduksi elite melalui mekanisme epistemik kolonial (Resink 1974; Adams 2019; Mrázek 2024; Klinken 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan relasi Snouck Hurgronje dan Hoesein sebagai bagian dari politik pengetahuan kolonial, bukan sekadar hubungan guru dan murid. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan Hoesein sebagai aktor epistemik yang dibentuk oleh tradisi akademik kolonial, tetapi juga berperan sebagai mediator pengetahuan antara dunia pribumi, Islam, dan Barat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pembentukan elite intelektual pribumi berlangsung melalui pendidikan, patronase, jaringan keilmuan, dan legitimasi akademik kolonial.

Berangkat dari konteks tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, apa motif Snouck dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan Hoesein, dan sejauh mana motif tersebut berkaitan dengan kepentingan politik pengetahuan kolonial? Kedua, isu-isu apa saja baik yang secara personal yang menjadi ruang komunikasi “intim” antara guru dan murid? Ketiga, bagaimana Snouck menerima, menegosiasikan, atau justru mengkritisi keputusan Hoesein untuk beralih dari jalur akademik menuju birokrasi kolonial? Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan hubungan Snouck dan Hoesein sebagai studi kasus utama untuk memahami bagaimana politik pengetahuan kolonial bekerja melalui relasi guru dan murid, serta bagaimana relasi tersebut membentuk arah perkembangan intelektual pribumi di Hindia Belanda pada awal abad ke-20.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 1994; Sjamsuddin 2012; Lubis 2020). Tahap heuristik dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber utama dalam penelitian ini berupa korespondensi atau surat-menyurat antara Hoesein dengan Snouck yang berlangsung dalam rentang waktu 1913–1936. Menurut Eve T. Bannet (2020, 115–116) korespondensi bersifat terfragmentasi dan hadir dalam berbagai bentuk, dari refleksi personal hingga laporan formal. Justru keragaman inilah yang menjadikannya sumber sejarah penting untuk memahami konteks personal, sosial, dan intelektual di balik penulisannya. Arsip korespondensi antara Snouck dan Hoesein diperoleh dari Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode koleksi DH 1105. Selain itu, penelitian ini juga menghimpun surat menyurat antara Mangkoenagoro VII dengan Snouck dari Perpustakaan Reksopustoko yang juga menjelaskan posisi Hoesein sebagai murid Snouck. Lebih lanjut, dalam penelitian ini menggunakan sumber primer berupa artikel-artikel yang dimuat dalam majalah ilmiah *Djâwâ* edisi 1927, yang memuat tulisan yang ditujukan kepada Snouck untuk peringatan tujuh puluh tahun usianya dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan yang beberapa artikel ditulis oleh Hoesein dan Achmad.

Selain menggunakan sumber primer, digunakan juga beberapa sumber sekunder,

seperti beberapa catatan tentang Hoesein yang ditulis oleh G.F Pijper (1961) dengan judul *Professor Dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat: 8 December 1886—12 November 1960* dan biografi Hoesein yang pernah juga ditulis oleh Sutopo Sutanto (1983) yang berjudul *Prof. Husein Jayadiningrat: Hasil Karya dan Pengabdianya*. Selain itu, beberapa sumber sekunder mengenai Snouck yang utamanya ditulis oleh Wim van den Doel (2023) dengan judul *SNOUCK: Biografi Ilmuwan Christiaan Snouck Hurgronje* dan tulisan M. McFate (2019) yang berjudul *Useful Knowledge: Snouck Hurgronje and Islamic Insurgency in Aceh* juga digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan tahapan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kritik sumber dilakukan melalui kritik eksternal dan internal untuk menilai keaslian, keterandalan, dan kredibilitas sumber, termasuk verifikasi asal-usul arsip, kronologi, serta analisis isi dengan memperhatikan bahasa, tujuan komunikasi, dan relasi kuasa antara penulis dan penerima, khususnya posisi Hoesein sebagai intelektual pribumi dan Snouck sebagai orientalis sekaligus penasihat kolonial. Sumber-sumber yang telah dikritisi kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka politik pengetahuan kolonial dengan membaca data sebagai teks yang merefleksikan produksi pengetahuan, relasi guru dan murid, serta pembentukan identitas intelektual. Tahap akhir berupa historiografi disusun dalam bentuk narasi sejarah analitis secara kronologis dan tematik untuk menelusuri kesinambungan relasi keduanya serta menafsirkan peran pendidikan dan relasi akademik dalam pembentukan elite intelektual pribumi pada awal abad ke-20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Snouck Hurgronje dan Politik Pengetahuan Kolonial

Hoesein mempertahankan disertasinya tentang *Critische Beschouwing van Sadjarah Banten: Bijdrage Ter Kenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving* (1913) di Academieggebouw Universitas Leiden, dengan Snouck sebagai pembimbing dan penguji utama, satu-satunya kandidat doktor asal Hindia Belanda saat itu. Menurut Wim van den Doel (2023, 53), peristiwa ini bukan hanya keberhasilan akademik pribadi, tetapi juga menjadi panggung simbolik yang menunjukkan keberhasilan proyek pendidikan kolonial dalam membentuk intelektual pribumi modern.

Respons para penguji, termasuk H. Kern, menunjukkan apresiasi tinggi terhadap disertasi Hoesein, sebagaimana dicatat oleh Pijper (1961, 403), menurut Kern disertasi

Hoesein dinilai membuka arah baru dalam historiografi Hindia Belanda karena berhasil memadukan sumber lokal dan arsip kolonial secara koheren, sebuah capaian yang tidak mudah bahkan bagi sarjana Belanda. Pengakuan ini memperkuat posisi disertasi tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah intelektual kolonial (Razy, Sofianto, dan Jaelani 2022, 108). Temuan dan pendekatan metodologis dalam disertasi ini dengan demikian tidak berhenti sebagai capaian akademik pada konteks kolonial semata, melainkan menjadi fondasi awal bagi orientasi historiografis Hoesein pada fase-fase berikutnya (Djajadiningrat 1995).

Kepulangan Hoesein ke Hindia Belanda beberapa waktu setelah ujian disertasinya membawa ia kembali ke Jawa setelah delapan tahun mengenyam pendidikan di Belanda. Hoesein, mendapat sambutan meriah dari keluarganya semenjak dirinya menapakkan kaki pertama kalinya di Batavia, dilanjutkan ke Serang, Pandeglang, dan Menes. Kesan yang Hoesein dapatkan kemudian ia dokumentasikan melalui suratnya kepada Snouck.

[...] Setelah melaporkan diri, saya pergi ke stasiun untuk menuju Serang, dan di wilayah kabupaten saya mendapati banyak orang yang menyambut kami. Bahkan pada hari-hari berikutnya, saya harus terus-menerus berbicara dengan orang-orang yang diliputi rasa ingin tahu dan datang menyapa saya, baik ketika saya berada di Pandeglang maupun di Menes. Namun demikian, saya berusaha tetap tenang dan kuat meskipun selalu dikelilingi banyak orang. Selama empat minggu, saya mengalami kesulitan meskipun saya menghargai antusiasme mereka karena kondisi ini membuat saya memiliki sedikit kesempatan untuk berbincang santai dengan saudara-saudara saya di rumah. Meskipun telah lama meninggalkan tempat ini, saya dengan cepat kembali merasa seperti di rumah. Sepanjang hari, dari pagi hingga sore, saya berusaha berbicara sebaik mungkin dalam bahasa Sunda, meskipun hal itu sangat melelahkan dan kerap mengundang tawa orang-orang di sekitar saya [...] (Hoesein Djajadiningrat, "Hoesein Djajadiningrat Kepada Snouck Hurgronje", 7 Oktober 1913).

Pengalaman Hoesein tersebut dapat dibaca dalam kerangka politik bahasa kolonial. Menurut Groeneboer (1999, 12), bahasa tidak hanya mengatur fungsi administratif, tetapi juga membentuk hierarki dengan menempatkan bahasa Eropa sebagai bahasa ilmu dan bahasa pribumi sebagai bahasa keseharian. Kelelahan Hoesein saat kembali menggunakan bahasa Sunda mencerminkan internalisasi bahasa Belanda sebagai bahasa utama berpikir akademik, sementara bahasa lokal tersubordinasi dan menuntut adaptasi ulang (Groeneboer 1993, 89). Pengalaman ini serupa dengan Raden Saleh yang mengalami jarak kultural dan linguistik setelah lama bermukim di Eropa. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa politik bahasa kolonial tidak hanya membentuk kompetensi

linguistik, tetapi juga menghasilkan keterasingan simbolik bagi elite pribumi modern yang hidup di antara dua dunia bahasa dan kebudayaan (Carey 1982, 3–4).

Tidak lama setelah itu, Hoesein direkrut oleh komisi Volkslectuur (Komisi Sastra) di Hindia Belanda untuk menggantikan Philippus Samuel van Ronkel seorang ahli Melayu yang kemudian kembali ke Belanda (Suminto 1985, 37). Penunjukan ini menandai kelanjutan penelitian mengenai bahasa dan kebudayaan Melayu yang kemudian berada di bawah tanggung jawab Hoesein. Tugas pertamanya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memetakan wilayah Suku Baduy yang tersebar di sejumlah desa di Banten. Dalam pelaksanaan penelitian tersebut, Hoesein tampak mengadopsi pendekatan yang sebelumnya dikembangkan oleh Snouck, khususnya dalam penggunaan kamera sebagai instrumen dokumentasi etnografis. Bagi Snouck (2007, 102), praktik memotret manusia dan kebudayaan yang diteliti merupakan bagian penting dari metode penelitian pada masa itu. Hal ini tercermin dalam dokumentasi fotografis yang dilakukan selama berada di Mekkah pada akhir abad ke-19. Potret-potret jamaah haji yang dihasilkannya hingga kini masih dipandang sebagai peninggalan visual yang bernilai penting (Chambert-Loir 2013, 20). Sebagaimana yang disampaikan Hoesein (Hoesein Djajadiningrat, “Hoesein Djajadiningrat Kepada Snouck Hurgronje”, 20 Oktober 1913) kepada Snouck bahwa ia melakukan survei batas wilayah yang diklaim sebagai bagian dari Banten. Atas perintah Regen, pejabat kolonial bersama Bupati Lebak meninjau beberapa desa, termasuk Kadjeroean Tjibeo, Tjikarta, dan Tjikeusik, serta mendokumentasikan tata ruang dan penanda batas setempat. Selama sekitar satu minggu di lokasi, dokumentasi dilakukan melalui fotografi dengan bantuan Cornelis Marinus Pleyte yang turut hadir atas undangan pemerintah.

Beberapa bulan kemudian, pada April 1914, Hoesein dikirim ke Kutaraja ibu kota Aceh sekaligus bekas pusat Kesultanan Aceh untuk meneliti batu nisan serta mengumpulkan bahasa vernakular dalam rangka proyek penyusunan Kamus Aceh–Belanda, melanjutkan kerja yang sebelumnya telah dirintis oleh Snouck pada beberapa dekade sebelumnya. Pada periode yang sama, penelitian ilmiah mengenai budaya dan sejarah Aceh mengalami intensifikasi yang signifikan, dipelopori oleh *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Perhimpunan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia) serta *Commissie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* (Komisi Penelitian Kepurbakalaan di Hindia Belanda untuk Jawa dan

Madura). Menurut Mirjam Shatanawi (2022, 138) fokus utama kajian diarahkan pada artefak dari Kesultanan Pasai dan Aceh, khususnya batu nisan Islam, yang dipandang sebagai sumber kunci untuk menelusuri fase awal Islamisasi di Melayu. Kontribusi penting dalam bidang ini dihasilkan melalui penelitian L. Melville, J. J. de Vink, dan J.P. Moquette di Lhokseumawe dan Kutaraja, yang kemudian diperluas hingga mencakup batu nisan Islam di wilayah Pasai (Scalliet 2008, 398).

Atas saran Snouck, Melville dikirim ke Aceh dan menjadi peneliti pertama yang melakukan kerja lapangan di Lhokseumawe pada awal 1908. Penelitiannya terhenti ketika ia terserang malaria dan harus kembali ke Batavia pada Agustus tahun yang sama, sehingga upaya pencarian pengganti segera dilakukan. Adapun pemerintah kolonial kemudian mencari penggantinya, setelah seorang fotografer Jawa yang pernah bekerja sama dengan Van Erp di Borobudur dinilai tidak memenuhi kualifikasi teknis, penunjukan akhirnya diberikan kepada de Vink, seorang Indo-Eropa yang dianggap lebih mampu memenuhi tuntutan akademik proyek tersebut (Perret 2018, 33–34). Sebelum berangkat ke Aceh pada April 1912, de Vink menjalani pelatihan di Batavia di bawah bimbingan Melville dan Moquette, dan selama di Aceh ia didampingi oleh ulama lokal dan Habib Tjoet hingga 1917.

Meskipun awalnya dirancang sebagai dokumentasi sistematis seluruh monumen berinsripsi, ruang lingkup proyek ini mengalami perubahan pada 1913. Atas arahan Komisi Penelitian Kepurbakalaan, Moquette dengan dukungan de Vink membatasi dokumentasi pada batu nisan bernilai historis sekaligus memperluas cakupan penelitian ke seluruh wilayah Aceh. Sejak April 1914, de Vink bergabung dengan Hoesein, yang berperan penting dalam mengidentifikasi monumen-monumen yang layak diteliti. Berbasis di Kutaraja, de Vink berhasil mengumpulkan sekitar 1.100 estampage dan lebih dari enam ratus foto tambahan (Perret 2018, 34). Keterlibatan Hoesein, yang juga merupakan rekomendasi langsung dari Snouck, berlanjut dalam penelitian bersama Moquette di Kandang Meuh, Gunongan, dan Pasai, termasuk kajian atas batu nisan Sultan Malik al-Saleh dan Sultan Muhammad yang dipublikasikan dalam bentuk transliterasi dan terjemahan (Djajadiningrat 1927b, 5).

Signifikansi temuan Hoesein ini memainkan peran sentral dan segera mendapat pengakuan serta menempatkannya di garis depan studi epigrafi Aceh. Laporan mengenai penemuan tersebut dimuat dalam *De Nieuwe Courant* pada 15 Juni 1914 sebagai bentuk

pengakuan resmi atas kolaborasi ilmiah antara Hoesein dan para sarjana kolonial. Laporan itu menyebutkan penemuan makam lima sultan pertama Aceh beserta inskripsi Arab pada batu nisannya yang sebagian besar masih utuh, sebuah terobosan penting mengingat sejak terbitnya karya P. J. Veth *Atjeh en zijne betrekkingen tot Nederland* (1873), kronologi awal Kesultanan Aceh masih belum pasti. Ketika Hoesein menyusun *Critisch Overzicht Van De In Maleische Werken Vervatte Gegevens Over De Geschiedenis Van Het Soeltanaat Van Atjeh I – III* (1911a; 1911b; 1911c), ia masih bergantung pada kritik teks atas sumber-sumber yang tidak sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, temuan makam-makam tersebut yang dilakukan bersama Moquette di sekitar Kutaraja dan menuju Pasai dipandang sebagai kunci penting bagi rekonstruksi sejarah awal Aceh (*De Nieuwe Courant* 1914). Snouck menyambut temuan ini dengan antusias dan menekankan signifikansinya bagi penyusunan Kamus Aceh–Belanda serta pengembangan glosarium bahasa Aceh, sekaligus memperlihatkan relasi saling bergantung antara bimbingan akademik Snouck dan produksi pengetahuan lapangan oleh Hoesein dan Moquette (Snouck Hurgronje, “Snouck kepada Hoesein, 7 Juni 1914”). Bagi Snouck, pertukaran ini menjadi sarana penting untuk memperoleh informasi langsung mengenai temuan-temuan terbaru di Hindia Belanda.

Menurut David Kloos (2021, 399) Snouck tetap memerlukan laporan-laporan langsung dari Hindia Belanda meskipun ia telah bermukim kembali di Belanda pasca 1906 karena posisi keilmuannya sangat bergantung pada data lapangan mutakhir yang tidak dapat diperoleh dari arsip atau literatur semata. Kebutuhan ini menjadi semakin mendesak dalam konteks wilayah-wilayah pascakonflik, terutama Aceh dan Banten, yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sama-sama mengalami ketegangan politik dan sosial setelah intervensi militer kolonial. Di Aceh, runtuhnya Kesultanan tidak serta-merta menghadirkan stabilitas. Sementara di Banten, perlawanan petani Cilegon pada 1888 menunjukkan bahwa kontrol kolonial tetap rapuh dan rentan (lihat Alfian 1987; Reid 2010; Kloos 2013; Kartodirdjo 1966). Kondisi keamanan yang belum sepenuhnya pulih ini membatasi kehadiran langsung sarjana Eropa di lapangan. Oleh karena itu, laporan dari Hindia–Belanda baik dari Aceh maupun Banten menjadi sarana utama bagi Snouck untuk memantau dinamika sosial, linguistik, dan keagamaan yang terus berubah. Melalui korespondensi dan laporan lapangan, Snouck mempertahankan klaim atas pengetahuan yang terbaru, kontekstual, dan berbasis observasi empiris, sehingga otoritas ilmiahnya

sebagai orientalis dan penasihat kolonial tetap terjaga meskipun ia tidak lagi hadir secara fisik di wilayah jajahan.

Di sisi lain, kebutuhan Snouck atas laporan dari Hindia juga berkaitan erat dengan perannya dalam jaringan politik pengetahuan kolonial dan cara ia memosisikan para aktor pribumi terdidik di dalamnya. Dalam skema ini, Hoesein menempati posisi yang secara struktural serupa dengan informan-informan pribumi lain seperti Hasan Mustapa, Aboe Bakar Djajadiningrat, dan Sayyid Uthman sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni sebagai penyedia data lapangan yang krusial. Namun, tingkat kepercayaan epistemik yang diberikan kepada Hoesein jauh lebih tinggi (Laffan 2015, 20–134). Pendidikan akademik dan pelatihan metodologis yang ia peroleh dalam tradisi keilmuan Belanda membuat laporan-laporannya dipandang lebih reliabel, karena telah disusun sesuai dengan standar bahasa, sistematika, dan kritik ilmiah Eropa. Dalam konteks wilayah sensitif seperti Aceh dan Banten, laporan Hoesein tidak sekadar diperlakukan sebagai pengetahuan lokal yang perlu disaring, melainkan sebagai bahan ilmiah yang relatif siap untuk diintegrasikan ke dalam produksi pengetahuan kolonial. Relasi ini menegaskan bahwa meskipun Snouck secara geografis terpisah dari Hindia Belanda, ia tetap menempatkan dirinya di pusat validasi dan legitimasi pengetahuan, sementara Hoesein berfungsi sebagai perpanjangan epistemik yang menjembatani dunia kolonial dan metropolitan dalam hierarki keilmuan yang tidak sepenuhnya setara.

Claude Guillot (2008, 5–9) dapat memperkuat pembacaan tersebut. Guillot mengakui bahwa disertasi Hoesein memiliki kualitas ilmiah yang sangat kuat, bahkan selama puluhan tahun hampir tidak ada yang secara serius menggugat fondasi akademiknya. Namun, Guillot juga menunjukkan satu persoalan penting, yaitu ketika Hoesein berhadapan dengan dua sumber yang saling bertentangan, sumber Barat dan sumber lokal. Dalam situasi tersebut, Hoesein cenderung memilih sumber Barat sebagai rujukan yang dianggap lebih sahih. Pilihan ini menjadi menarik karena kemudian diketahui bahwa informasi yang lebih tepat justru berasal dari sumber lokal. Dengan demikian, kekeliruan Hoesein bukan semata-mata dapat dibaca sebagai kelemahan metodologis pribadi, melainkan sebagai gejala dari struktur pengetahuan kolonial yang menempatkan sumber Barat pada posisi lebih tinggi dibandingkan sumber pribumi (Stoler 2002, 88, 2009, 11). Di sinilah tampak bahwa meskipun Hoesein memiliki kedekatan budaya dengan dunia lokal yang ia teliti, tetap bekerja dalam kerangka epistemik kolonial

yang memberi otoritas lebih besar kepada pengetahuan Eropa (Razy et al 2022).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa relasi Hoesein dan Snouck tidak hanya mencerminkan hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan antara yang dijajah dan yang menjajah dalam epistemologi pengetahuan kolonial. Pengetahuan lokal dapat hadir, bahkan dapat menjadi benar, tetapi sering kali baru memperoleh legitimasi apabila disaring, diterjemahkan, atau disahkan melalui otoritas Barat. Oleh karena itu, posisi Hoesein menjadi ambivalen. Menurut Goss (2011, 14) bahwa sosok seperti Hoesein yang merupakan intelektual pribumi yang berperan penting dalam produksi ilmu pengetahuan, namun pada saat yang sama ia juga berada dalam sistem kolonial yang membatasi cara pengetahuan lokal diakui sebagai kebenaran ilmiah.

Antara Hutang dan Urusan Cinta

Sekembalinya dari Aceh, Hoesein menetap di Batavia untuk mengolah hasil penelitiannya sebagai persiapan penyusunan Kamus Aceh–Belanda. Ia berkorespondensi intensif dengan Snouck untuk memvalidasi temuan dan mendiskusikan aspek metodologis, sekaligus membahas persoalan keluarga dan urusan pribadi, yang menunjukkan kedekatan relasi mereka di luar ranah akademik. Pada periode yang sama, adik Hoesein, Loekman, telah empat tahun bermukim di Belanda untuk menempuh studi lanjutan dan pada akhirnya diterima sebagai mahasiswa di Technische Hoogeschool di Delft, sebuah perkembangan yang turut menjadi bagian dari percakapan dan perhatian Hoesein dalam korespondensinya. Menurut Poeze (1986, 91) Loekman cukup aktif bersosialisasi dan terlibat dalam berbagai organisasi Hindia di Belanda. Aktivitas tersebut membuka kesempatan baginya untuk menjabat sebagai ketua Indische Vereeniging pada tahun 1915 sebelum akhirnya digantikan oleh Dachlan Abdoellah (Suryadi 2023, 142). Sebuah posisi yang menunjukkan peran pentingnya dalam jejaring sosial dan intelektual mahasiswa Hindia Belanda di Belanda.

Sebagai figur sentral organisasi mahasiswa Hindia di Belanda, Loekman dikenal cerdas dan berpotensi besar. Snouck mengakui kapasitas intelektualnya. Sementara itu, Van Mook kemudian menjadikannya orang kepercayaan dan Direktur Pendidikan pada dekade akhir pemerintahan kolonial. Ia merepresentasikan generasi priayi terpelajar yang mampu menjembatani tradisi Barat dan struktur sosial Jawa, terutama dalam kebijakan pendidikan kolonial. Van Mook (1944, 2) dalam memoarnya khusus terhadap Loekman,

menekankan kapasitas administratif dan intelektual Loekman, serta kemampuannya menghubungkan kepentingan pemerintah kolonial dengan kebutuhan masyarakat pribumi, terutama melalui kebijakan dan pengelolaan pendidikan pada masa-masa genting pemerintahan kolonial. Namun, pada masa studinya Loekman menghadapi berbagai persoalan. Kelalaian akademik dan gaya hidupnya menghambat penyelesaian studi di Delft, sebelum akhirnya masuk ke dinas administrasi kolonial. Ia juga terlilit utang, sehingga kerap menerima bantuan finansial dari Snouck, yang bahkan turut diselesaikan oleh Hoesein dan Achmad. Situasi ini menunjukkan bahwa relasi intelektual mereka juga dibingkai oleh patronase dan ketergantungan personal.

[...] Tidak semuanya berjalan sebagaimana yang dia (Loekman) inginkan. Keterlibatannya, yang saya ragukan apakah dianggap diinginkan, membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang dia ingin dedikasikan untuk studinya. Selain itu, sebagian besar waktu dan minatnya terfokus pada kehidupan perkumpulan dan enggan usaha yang gigih, ia dapat mengikuti ujian pada bulan Juli atau Oktober, atau mungkin juga pada bulan Juni. Dalam periode relatif stabil ini, tampaknya keluarganya (Loekman dan istrinya) kembali sepenuhnya mengabaikannya dan meninggalkannya. [...] pada bulan November, bank mengejutkannya dengan pemberitahuan bahwa kreditnya dicabut pada musim dingin yang lebih keras dari sebelumnya yang kita alami. Dia tiba-tiba berada tanpa sumber daya dan itu terjadi secara bertahap (Snouck Hurgronje, “Snouck kepada Hoesein”, 5 Januari 1919).

Hal ini menunjukkan bahwa jalur pembentukan elite pribumi terdidik tidak selalu berjalan linier dan ideal sebagaimana dibayangkan dalam proyek pendidikan kolonial (Kuitenbrouwer 1986, 82). Pengalaman Loekman menunjukkan bagaimana kegagalan akademik, persoalan finansial, dan jejaring patronase saling berkelindan dalam membentuk arah hidupnya. Dengan demikian, relasi personal antara Loekman, Hoesein, dan Snouck membuka sisi lain dari politik pendidikan kolonial yang sarat dengan ketergantungan, pengawasan, dan negosiasi yang berkelanjutan, di mana hubungan emosional dan bantuan material berfungsi sebagai mekanisme informal untuk menjaga disiplin, loyalitas, sekaligus keberlanjutan proyek pembentukan elite pribumi modern dalam kerangka kekuasaan kolonial.

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika personal dan patronase yang membentuk pengalaman individu elite pribumi tersebut juga berkelindan dengan keterlibatan mereka dalam proyek-proyek kelembagaan kolonial yang berupaya mengelola dan mengarahkan ekspresi kebudayaan serta identitas kolektif pribumi. Pada periode yang sama, Hoesein

juga disibukkan dengan pembentukan Java Instituut, sebuah organisasi studi kebudayaan yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum. Dalam proses ini, Hoesein memainkan peran sentral dan kemudian ditunjuk sebagai ketua organisasi. Menurut Supardi (2013, 19), Java Instituut bertujuan mengembangkan kajian keilmuan yang berbasis pada kebudayaan Jawa Raya, sebuah gagasan yang sejalan dengan pandangan nasionalisme Jawa yang telah berkembang beberapa tahun sebelumnya (Fakih 2014, 41–43, 2012, 420–21). Dalam kerangka nasionalisme tersebut, kebudayaan Jawa diposisikan sebagai landasan identitas kolektif yang melampaui batas-batas administratif kolonial. Adrian Perkasa (2025) dalam disertasinya menjelaskan bahwa visi Jawa Raya secara khusus dimaknai sebagai upaya penyatuan kembali kebudayaan Sunda, Jawa, Madura, dan Bali ke dalam satu entitas kultural yang terpadu, sekaligus sebagai respons terhadap fragmentasi sosial dan kultural yang dihasilkan oleh tata kelola kolonial. Selain itu, wilayah-wilayah dengan kebudayaan lain seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga turut diperhitungkan dalam kerangka visi kebudayaan tersebut, meskipun tidak menjadi fokus utama.

Upaya ini memperoleh dukungan dari sejumlah kolega Hoesein, baik dari kalangan terdidik di Belanda maupun dari elite pribumi. Samuel Koperberg, yang kelak menjabat sebagai sekretaris Java Instituut, menjadi salah satu pendukung utama organisasi tersebut. Dukungan juga datang dari Achmad, yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Serang, serta Wiranatakoesoema, Bupati Bandung, yang merepresentasikan keterlibatan para *ambtenaar* pribumi. Selain itu, dukungan simbolik dan politik diberikan oleh dua dari empat kekuatan istana di Jawa, yakni Hamengkoeboewono VIII dari Yogyakarta dan Mangkoenegoro VII dari Surakarta, bersama sejumlah priyayi lainnya, yang semakin mengukuhkan Java Instituut sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah kolonial dan elite pribumi terdidik. Menurut Hoesein (1924, 5) dukungan tersebut teramat penting untuk memperkuat legitimasi Java Instituut di dalam inti pusat kekuasaan Jawa.

Melalui Java Instituut, Hoesein (Gambar 1) banyak berinteraksi dengan berbagai cendekiawan dan *ambtenaar* pribumi. Salah satu relasi penting yang terbangun adalah dengan Mangkoenegoro VII, yang telah ia kenal sejak masa pendidikannya di Belanda. Namun, pada 1915 Mangkoenegoro VII harus kembali ke Surakarta untuk menyambut suksesi kekuasaan menyusul wafatnya Mangkunegara VI, dan secara resmi mulai memerintah pada 1916 hingga 1944. Pada Desember 1919, Java Instituut

menyelenggarakan kongres pertamanya yang bertempat di kediaman Panembahan Tjakraningrat (Fauzi, Wiyanarti, dan Yulianti 2023, 222). Dalam kesempatan tersebut, Mangkoenagoro VII hadir bersama keluarga besar Mangkunegaran termasuk putrinya, Partini, yang juga tercatat sebagai anggota Java Instituut. Kongres inilah yang menjadi momen pertemuan berkesan antara Hoesein dan Partini, meskipun keduanya sebenarnya telah bertemu sebelumnya di kediaman G. A. J. Hazeu di Batavia pada 1918.



Gambar 1. Hoesein pada 1920.

Sumber. KITLV, Url. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:781080>

Dalam otobiografinya yang ditulis oleh Ratna Pamoentjak Singgih (1985, 55) Partini mengisahkan keterkejutannya saat mengetahui bahwa ketua Java Instituut adalah sosok yang pernah ia temui sebelumnya. Pada sebuah kongres, Hoesein memberinya kelonggaran ketika ia lupa membawa kartu anggota, yang kemudian menjadi awal perkenalan lebih formal melalui perantaraan F. D. K. Bosch dan surat kepada Mangkoenagoro VII. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Java Instituut bukan hanya ruang produksi wacana kebudayaan, tetapi juga arena pembentukan relasi personal dan jejaring elite pribumi dalam konteks politik kebudayaan kolonial.

[...] saya masih ada suatu permohonan mengenai putri Tuan dan Saya. Saya akan senang sekali untuk melanjutkan perkenalan kami dan memeliharanya. Karena kesempatan bertemu jarang sekali, maka apakah saya diperbolehkan mengirimkan surat kepadanya dan sebaliknya dia mengirim kepada saya? Dengan sangat mengharapkan menerima jawaban persetujuan (Hoesein Djajadiningrat, “Hoesein Djajadiningrat kepada Mangkoenagoro VII”, 24 Januari 1920).

Mangkoenagoro VII dan Partini menyetujui perkenalan tersebut, sehingga Partini dan Hoesein diperbolehkan untuk saling berkiriman surat. Namun, sebagaimana dituturkan Partini dalam otobiografinya (1985, 57) setiap surat balasan yang hendak ia kirimkan kepada Hoesein terlebih dahulu harus melalui kurasi Mangkoenagoro VII. Praktik ini mencerminkan tata kelola relasi personal dalam lingkungan bangsawan Jawa, komunikasi terutama yang berpotensi mengarah pada hubungan pernikahan tetap berada di bawah pengawasan otoritas keluarga dan istana. Kurasi surat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan moral, tetapi juga sebagai bentuk kontrol simbolik atas kehormatan keluarga serta kesesuaian relasi sosial dengan etika kebangsawanan. Berdasarkan perspektif relasi gender, praktik ini menegaskan posisi perempuan bangsawan sebagai subjek yang suaranya dimediasi dan diawasi, bahkan dalam ekspresi afeksi yang bersifat personal (Gouda 1993, 320). Otonomi Partini dalam membangun relasi emosional dibingkai oleh struktur patriarkal istana, ini menunjukkan figur ayah berperan sebagai penjaga kehormatan sekaligus pengatur legitimasi hubungan.

Seiring berlanjutnya relasi tersebut, peran pengawasan ini kemudian dilembagakan secara formal melalui prosesi lamaran, ketika Achmad kakak sekaligus wali dari Hoesein datang melamar Partini ke Pura Mangkoenagaran pada November 1920, ini menandai peralihan relasi privat ke dalam tatanan sosial dan politik yang diakui secara adat dan institusional. Partini (1985, 67–68) menjelaskan bahwa prosesi lamaran diawali dengan sambutan Achmad yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya bersama Hoesein, yang kemudian direspons dengan pidato singkat Mangkoenagoro VII yang menyatakan persetujuannya atas lamaran tersebut. Tidak lama setelah itu, Hoesein menjemput Partini di Dalem Pura Mangkoenagaran, dan keduanya bergandengan tangan menuju Pringgitan. Pada kesempatan yang sama, Mangkoenagoro VII menyampaikan kepada Partini bahwa pernikahan mereka akan dilangsungkan pada 9 Januari 1921. Relasi afektif antara Hoesein dan Partini tidak hanya dibingkai oleh perasaan personal, tetapi juga dinegosiasikan melalui struktur keluarga, hierarki kebangsawanan, dan tata nilai sosial yang mengatur kehidupan elite pribumi pada masa kolonial.

Mangkoenagoro VII juga tercatat sebagai anggota Volksraad, sehingga ia kerap melakukan kunjungan ke Batavia. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut, Partini dan Hoesein pun memiliki ruang untuk berjumpa. Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Partini (1985, 67), meskipun prosesi lamaran telah dilangsungkan, interaksi mereka tetap

berada di bawah pengawasan ketat Patih Sarwoko Mangoenkoesemo. Di sisi lain, persiapan pernikahan di Pura Mangkoenagaran dilakukan secara matang sejak akhir 1920 hingga awal 1921. Dalam proses tersebut, Hoesein menjalin korespondensi dengan Snouck untuk menyampaikan rencana pernikahannya dengan Partini, sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan personal kepada figur yang selama ini berperan penting dalam perjalanan intelektualnya.

[...] Sebagaimana telah saya sampaikan dalam surat saya terdahulu tertanggal 30 Rajab, dengan ini saya hendak mengabarkan bahwa rencana pernikahan saya dengan Raden Adjeng Partini akan dilangsungkan pada tanggal 28 Rabiulakhir, yang bertepatan dengan 9 Januari 1921 (Hoesein Djajadiningrat, “Hoesein Djajadiningrat kepada Snouck Hurgronje”, 10 Desember 1920).

Snouck telah mengenal Mangkoenagoro VII sejak di Belanda dan memandangnya sebagai bangsawan Jawa berwawasan modern (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, 46). Pernikahan Hoesein dengan putri Mangkoenagoro VII dapat dibaca sebagai pertemuan antara jejaring intelektual kolonial dan elite bangsawan pribumi. Mangkoenagoro VII bahkan menyebut status Hoesein sebagai murid Snouck sebagai alasan penerimaannya sebagai menantu, menunjukkan bahwa patronase akademik kolonial menjadi sumber legitimasi sosial yang kuat dalam lingkungan elite Jawa.

Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebaikan Tuan berkenaan dengan pernikahan putri saya, Raden Adjeng Partini, dengan Raden Hoesein Djajadiningrat. Bahwa ia adalah murid Tuan merupakan salah satu alasan utama saya menerima pernikahan ini, dan atas dasar itu saya tidak pernah menaruh keraguan sedikit pun terhadap pribadi dan kedudukannya (Prangwedono/Mangkoenagoro VII, “Surat Mangkoenagoro VII Snouck Hurgronje”, 10 April 1921).

Dalam hal ini, relasi antara Snouck dan Hoesein memperlihatkan bahwa hubungan guru dan murid dalam konteks kolonial tidak semata-mata terbatas pada ranah akademik formal, melainkan kerap memasuki wilayah personal yang membentuk ikatan emosional, loyalitas, dan saling pengaruh yang kuat. Relasi semacam ini menunjukkan bahwa proses transmisi pengetahuan kolonial sering kali berjalan melalui kedekatan personal, di mana otoritas intelektual guru tidak hanya membimbing secara ilmiah, tetapi juga memengaruhi pilihan hidup, jaringan sosial, dan orientasi nilai muridnya.

Pola relasi serupa tampak dalam hubungan Schepper dan Amir Sjarifoeddin di Rechtshogeschool Batavia. Sebagaimana dipaparkan oleh Mrázek (2024, 36–38), Amir

kerap berdiskusi di luar kelas dengan gurunya, bahkan hingga persoalan visi pergerakan nasional. Kedekatan tersebut begitu kuat hingga memengaruhi keputusan personal Amir untuk berpindah agama, yang berdampak tragis bagi keluarganya. Menurut Gerry van Klinken (2025, 68), relasi pedagogis ini menunjukkan bahwa hubungan kolonial melampaui ruang akademik dan menyentuh ranah identitas serta kehidupan pribadi. Hal yang sama terlihat pada relasi Soekarno dan C. P. W. Schoemaker di Technische Hoogeschool te Bandoeng. Menurut Cindy Adams (2019, 79), diskusi dari Schoemaker di luar kelas turut membentuk horizon pemikiran Soekarno tentang kebebasan dan kebangsaan. Dalam ketiga kasus ini, relasi pedagogis lintas ras dan kebangsaan tidak semata menjadi instrumen dominasi, tetapi juga ruang dialektika intelektual yang melampaui batas disiplin dan struktur kolonial.

Negosiasi Orientasi Karier dalam Relasi Snouck–Hoesein

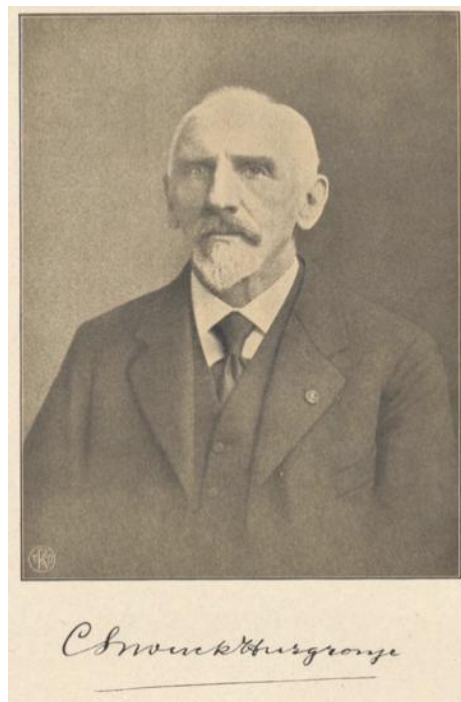
Keberlanjutan hubungan Snouck dan Hoesein tidak berhenti pada persoalan personal serta akademik. Korespondensi di antara keduanya justru terus berlangsung secara cukup intens dari tahun ke tahun. Pada 1922, Snouck diangkat sebagai rektor Universitas Leiden. Menurut Buana (2015, 26) dalam pidato pengukuhannya sebagai rektor, Snouck menyoroti gelombang besar mahasiswa pribumi yang menempuh pendidikan di Leiden maupun di wilayah Belanda lainnya. Fenomena ini dipandang mendesak, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli terdidik bagi administrasi dan institusi kolonial di Hindia Belanda. Poeze (1989, 261) bahkan menyebut periode ini sebagai “*golden age*” bagi perkembangan tradisi keilmuan di Hindia Belanda.

Sementara itu, di Hindia Belanda, Hoesein semakin aktif dalam berbagai kegiatan Java Instituut, bersamaan dengan upayanya menyelesaikan proyek besar Kamus Aceh–Belanda yang telah lama menjadi fokus intelektualnya. Namun, pada 1924, seiring meningkatnya kebutuhan akan tenaga ahli hukum, pemerintah kolonial mendirikan Rechtshogeschool te Batavia. Perguruan tinggi ini dipimpin oleh seorang ahli hukum dari Universiteit van Amsterdam, Paul Scholten (Djalins 2020, 162). Dalam konteks tersebut, Hoesein ditugaskan sebagai pengajar untuk mata kuliah Hukum Islam dan bahasa-bahasa lokal, seperti Melayu, Jawa, dan Sunda.

Penugasan ini memiliki makna khusus bagi Rechtshogeschool, mengingat kurikulum yang diterapkan berbeda dari sekolah-sekolah hukum Eropa pada umumnya yang masih mengarusutamakan bahasa Latin dan Yunani sebagai fondasi pendidikan hukum. Sebagaimana dicatat oleh Baron van Asbeck (1949, 30) penekanan pada bahasa-bahasa lokal mencerminkan orientasi pragmatis pendidikan hukum kolonial di Hindia Belanda, sekaligus menegaskan peran Hoesein sebagai penghubung antara tradisi keilmuan Barat dan kebutuhan administratif-kultural kolonial. Snouck merespons rencana pengangkatan Hoesein sebagai pengajar di Rechthoogeschool te Batavia.

[...] Untuk diri Anda sendiri, akan ada pekerjaan yang memikul tanggung jawab besar, karena pengaturan waktu dan pemanfaatan tenaga hampir sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri. Hukum *Mohammedaansche* atau lebih tepatnya Hukum Islam dalam penerapan dan maknanya bagi Hindia Belanda akan menjadi objek utama pengajaran Anda. Setelah beberapa tahun menjalankan tugas ini, orang tentu akan bertanya: “Apa yang telah H. (Hoesein) lakukan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan kita mengenai persoalan ini?” Bakat yang Anda miliki memberi keyakinan bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, asalkan Anda bekerja secara terencana dan dengan energi yang tak kenal lelah. Hal ini juga memiliki arti penting secara moral bagi sesama warga bangsa Anda, mengingat dalam masyarakat saat ini masih terdapat kecurigaan yang kuat terhadap kemampuan Orang Asli untuk bekerja secara mandiri, terutama mereka yang tidak memperoleh pendidikan yang memadai [...] (Snouck Hurgronje, “Snouck Hurgronje kepada Hoesein Djajadiningrat”, 18 Juli 1924).

Snouck memang menaruh perhatian besar terhadap hukum Islam, dan tidak dapat disangkal bahwa minat tersebut turut memengaruhi orientasi keilmuan Hoesein. Dalam tulisannya pada peringatan 70 tahun Snouck (Gambar 2.) tahun 1927 yang juga didokumentasikan dalam majalah *Djâwâ* terbitan Java Instituut. Hoesein (1927a, 68) menegaskan perhatian Snouck pada pentingnya kumpulan fatwa, yakni putusan para ulama Islam atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka mengenai persoalan agama dan hukum. Kumpulan fatwa semacam itu, menurut Snouck, memiliki arti penting baik dari sudut pandang ilmiah maupun praktis. Melalui fatwa-fatwa tersebut dapat diketahui, di satu sisi, persoalan-persoalan yang pada suatu masa tertentu dianggap penting, baik secara umum maupun khusus, di kalangan masyarakat Muslim tertentu; dan di sisi lain, para ulama yang memiliki otoritas menerapkan ajaran agama terhadap persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Snouck dalam Majalah Djâwâ pada peringatan hari lahirnya ke 70 tahun (Sumber. Djâwâ 1927, 64)

Pada kesempatan yang sama, Achmad menulis penghormatan atas kontribusi luas Snouck dalam tradisi keilmuan Hindia Belanda. Perannya tidak hanya dalam kajian hukum Islam, tetapi juga dalam membentuk praktik ilmu yang terkait erat dengan kepentingan pemerintahan kolonial. Menurut Achmad (1927, 65 & 67) Snouck dipandang sebagai ilmuwan yang menggabungkan riset, pengalaman lapangan, dan pertimbangan rasional untuk merumuskan solusi praktis, dengan pengaruh besar bagi tata sosial dan pemerintahan kolonial. Snouck berkontribusi besar dalam membentuk tradisi keilmuan di Hindia Belanda yang kemudian diteruskan murid-muridnya. Namun, relasinya dengan pemerintah kolonial tidak selalu harmonis, terutama terkait kebijakan penaklukan Aceh. Ia mendorong pendekatan kooperatif berbasis riset sosial-keagamaan, sementara Van Heutsz memilih strategi militer represif, yang memicu kekecewaan dan menempatkan Snouck dalam posisi ambigu. Menurut McFate (2019, 426), pemerintah kolonial dinilai tidak sepenuhnya mengikuti rekomendasi Snouck yang menekankan pendekatan kooperatif dalam menundukkan Aceh. Sebaliknya, Van Heutsz yang saat itu memimpin operasi militer di Aceh lebih memilih strategi represif dan sporadis, yang berpuncak pada pengasingan Sultan Mahmud Syah ke Ambon pada 1907. Kees van Dijk

(2022, 67) berpendapat bahwa kebijakan tersebut mengecewakan Snouck. Dalam konteks proyek Kamus Aceh–Belanda, Snouck bahkan dituduh menghambat penyelesaiannya. Padahal, keterlambatan lebih disebabkan oleh kompleksitas akademik dan kendala teknis. Ia justru mendesak Hoesein untuk segera merampungkan karya tersebut.

[...] Anda tidak akan salah paham jika saya meminta permohonan yang sangat mendesak terhadap harapan tulus tersebut, yaitu agar penggandaan kamus Bahasa Aceh dilakukan sekarang tida lagi ditunda. Anda tahu, bahwa beberapa tahun yang lalu penundaan itu dianggap oleh beberapa orang karena pengaruh saya, yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman dan menjauhkan saya dari beberapa teman. Anda juga mungkin tahu, bahwa di lingkungan lain, di mana orang-orang lebih paham, penundaan itu digunakan sebagai argumen untuk menuduh bukan hanya pribadi Anda [...] (Snouck Hurgronje, “Snouck Hurgronje kepada Hoesein Djajadiningrat”, 6 Januari 1926).

Akhirnya kamus Aceh–Belanda terbit pada tahun 1934 dalam dua jilid dengan lebih dari 1200 halaman (lihat Djajadiningrat 1934). Karya monumental ini merupakan salah satu pencapaian terpenting Hoesein dan menandai puncak dari kerja intelektual panjang yang telah ia lakukan sejak masa penelitian lapangan di Aceh pada dekade sebelumnya. Penyusunan kamus tersebut tidak hanya menuntut penguasaan linguistik yang mendalam, tetapi juga pemahaman kontekstual terhadap adat, struktur sosial, praktik hukum, dan kosmologi masyarakat Aceh, yang seluruhnya tercermin dalam pemilihan lema, contoh penggunaan, serta penjelasan semantis yang menyertainya.

Hoesein tercatat sebagai satu-satunya sarjana pribumi yang memperoleh penugasan khusus dari pemerintah kolonial untuk menyusun sebuah kamus berskala besar, sehingga menempatkannya dalam posisi yang unik sebagai leksikograf sekaligus mediator pengetahuan antara dunia kolonial dan masyarakat lokal. Sebelum Hoesein, tugas-tugas leksikografi semacam ini hampir sepenuhnya dipercayakan kepada sarjana Eropa, seperti Taco Roorda (1886), H. N. van der Tuuk (1861; 1897), atau Jonathan Rigg (1862), yang bekerja dalam tradisi filologi dan linguistik kolonial (Grijns 1996; Groeneboer 2002; Teeuw 1996; Kern 1976). Kepercayaan yang diberikan kepada Hoesein mencerminkan tingkat legitimasi ilmiah yang jarang diberikan kepada intelektual pribumi, sekaligus menunjukkan bagaimana negara kolonial memanfaatkan keahlian elite terdidik lokal untuk menopang kebutuhan administratif dan epistemiknya.

Posisi Hoesein ini membedakannya secara jelas dari leksikograf pribumi lainnya, seperti Raja Ali Haji (1986) yang menyusun kamus bahasa Melayu, atau R.A.A.

Kusumahningrat (Dalem Pancaniti) yang menyusun kamus dwibahasa Melayu–Sunda (lihat Reid dan Marr 1983; Rizki dkk. 2024; Kurnia 2021). Perlu dicatat bahwa kamus R.A.A. Kusumahningrat pada akhirnya tidak pernah diterbitkan, karena karya tersebut disiapkan untuk sebuah sayembara leksikografi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, di mana pemenangnya adalah Jonathan Rigg. Secara umum, karya-karya leksikograf pribumi tersebut terutama diarahkan pada kepentingan pengembangan dan kodifikasi bahasa lokal, serta berakar pada kebutuhan kultural dan pedagogis komunitas setempat. Sebaliknya, kamus yang disusun oleh Hoesein sejak awal diproyeksikan untuk melayani kepentingan administrasi kolonial dan produksi pengetahuan ilmiah tentang Aceh, sehingga beroperasi dalam medan kuasa yang berbeda. Pada posisi ini bahasa berfungsi sebagai instrumen epistemik sekaligus administratif dalam tata kelola kolonial.

Selain penyusunan kamus, Hoesein juga memasuki fase akhir kiprahnya sebagai pengajar di *Rechtshoogeschool te Batavia*. Hal ini terjadi karena satu tahun setelah Kamus Aceh–Belanda diterbitkan, ia diminta menggantikan kakaknya, Achmad, yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Raad van Indië. Achmad sendiri telah menjadi anggota Raad van Indië sejak 1929, setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Batavia. Dalam memoarnya, Achmad (1936, 301) menjelaskan bahwa posisinya harus digantikan oleh Hoesein karena ia terserang penyakit yang membuatnya tidak lagi mampu menjalankan tugas secara penuh. Konsekuensi dari penunjukan tersebut adalah Hoesein tidak diperkenankan lagi mengajar di *Rechtshoogeschool te Batavia*, karena jabatan di Raad van Indië menuntut keterlibatan penuh dalam birokrasi tinggi kolonial. Posisi Hoesein sebagai pengajar kemudian digantikan oleh Soepomo, seorang ahli hukum tata negara yang kelak memberikan kontribusi penting dalam perumusan landasan konstitusional Indonesia pascakemerdekaan.

Pengangkatan Hoesein sebagai Raad van Indië memicu polemik. Dalam catatan Achmad (1936, 303) R. A. Kern R. A. Kern menilai latar belakangnya sebagai sarjana bahasa dan kebudayaan kurang relevan untuk menghadapi persoalan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintahan kolonial saat itu. Kritik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan teknokratis birokrasi dan orientasi keilmuan Hoesein. Snouck sendiri lebih menghendaki Hoesein tetap menekuni jalur akademik, berbeda dengan Achmad yang sejak awal diarahkan ke administrasi kolonial. Karena itu, pengangkatan ini bukan

sekadar perubahan jabatan, tetapi juga pergeseran ekspektasi epistemik yang selama ini dilekatkan pada Hoesein dalam jejaring akademik kolonial.

Pada hari pertama tahun baru ini, saya berkesempatan menyampaikan ucapan selamat kepada Anda atas pengangkatan sebagai anggota Raad van Indië. Terus terang, saya perlu menambahkan bahwa selama ini saya membayangkan jalur karier Anda akan berbeda. Saya membayangkan Anda akan terikat secara permanen pada kerja-kerja ilmiah, terlebih karena sejauh ini Anda belum terlalu jauh terlibat dalam ranah administrasi dan politik. Namun demikian, melalui pengangkatan ini saya melihat adanya minat yang sungguh-sungguh dari pihak Anda terhadap bidang tersebut, dan saya yakin hal itu akan membawa kepuasan tersendiri bagi keluarga Anda. Yang tersisa bagi saya kini adalah turut berharap bahwa Anda sendiri juga akan menemukan kepuasan dalam keterlibatan baru ini, terutama jika Anda merasakannya sebagai sesuatu yang benar-benar mengikat dan bermakna bagi diri Anda [...] (Snouck Hurgronje, “Snouck Hurgronje kepada Hoesein Djajadiningrat”, 1 Januari 1935).

Fenomena ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas: banyak sarjana pribumi awal abad ke-20 tidak menempuh jalur yang dibayangkan guru Eropa mereka. Amir Sjarifoeddin, yang dididik sebagai ahli hukum, justru beralih menjadi aktivis politik radikal (Resink 1974, 432). Soekarno, lulusan teknik arsitektur di Technische Hoogeschool te Bandoeng, menggunakan bekal pendidikannya untuk membangun nasionalisme, bukan berkarier sebagai arsitek profesional (Adams 2019, 41). Dalam kerangka tersebut, harapan Snouck terhadap Hoesein menjadi bagian dari pola umum pendidikan kolonial yang membentuk elite terdidik, tetapi tidak sepenuhnya mengontrol arah penggunaan pengetahuan mereka. Jika Amir dan Soekarno bergerak ke arah oposisi politik, Hoesein justru memasuki birokrasi kolonial. Peralihannya dari dunia riset ke Raad van Indië mencerminkan fenomena yang oleh Andrew Goss (2011), disebut sebagai *floracrats*, transformasi sarjana menjadi birokrat negara kolonial. Dengan demikian, pengetahuan kolonial tidak berhenti sebagai produksi akademik, melainkan dilembagakan ke dalam struktur pemerintahan dan berfungsi menopang stabilitas administrasi kolonial.

Dengan demikian, relasi Snouck–Hoesein tidak dapat dibaca semata-mata sebagai hubungan personal antara guru Eropa dan murid pribumi, melainkan sebagai bagian dari politik pengetahuan kolonial yang bekerja melalui pendidikan, filologi, hukum Islam, dan birokrasi. Dalam kerangka Orientalisme yang digagas Edward Said (2012, 10–22) misalnya, pengetahuan tentang masyarakat Timur tidak pernah sepenuhnya netral, karena ia diproduksi dalam relasi kuasa yang memungkinkan kolonialisme memahami, mengklasifikasi, dan mengatur masyarakat jajahan. Hal ini tampak dalam bagaimana

keahlian Hoesein mengenai bahasa Aceh, hukum Islam, dan kebudayaan lokal memperoleh legitimasi ilmiah justru ketika pengetahuan tersebut dibutuhkan oleh negara kolonial. Sementara itu, melalui perspektif *power/knowledge* yang digagas oleh Foucault (1972, 6–19), karier Hoesein menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya berada di ruang akademik, tetapi juga dilembagakan ke dalam struktur pemerintahan melalui jabatan, kurikulum, kamus, dan otoritas administratif. Namun, posisi Hoesein tidak dapat direduksi sebagai agen pasif kolonialisme. Ia berada dalam ruang ambivalen, ketika pengetahuan kolonial yang diwariskan oleh Snouck dinegosiasikan ulang oleh seorang intelektual pribumi untuk membangun otoritas ilmiah, status sosial, dan peran birokratisnya sendiri. Oleh karena itu, keberlanjutan hubungan Snouck dan Hoesein memperlihatkan bahwa pendidikan kolonial tidak hanya menghasilkan reproduksi kuasa, tetapi juga membuka ruang negosiasi, adaptasi, dan pergeseran orientasi karier elite pribumi di Hindia Belanda.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa motif Snouck dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan Hoesein tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepedulian akademik seorang guru terhadap muridnya. Hubungan itu berkaitan erat dengan politik pengetahuan kolonial, yakni menjaga kesinambungan produksi, validasi, dan sirkulasi pengetahuan tentang masyarakat pribumi tetap berada dalam orbit otoritas kolonial. Melalui relasi yang dipelihara secara intensif, Snouck tidak hanya mempertahankan pengaruh intelektualnya, tetapi juga memastikan bahwa elite pribumi terdidik seperti Hoesein dapat berfungsi sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan Eropa dan kebutuhan administratif negara kolonial di Hindia Belanda.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ruang komunikasi antara Snouck dan Hoesein tidak terbatas pada urusan akademik formal. Surat-menyurat mereka memuat berbagai isu personal yang membentuk komunikasi intim antara guru dan murid, seperti karier, keuangan, keluarga, kesehatan, reputasi intelektual, hingga pengakuan simbolik. Dimensi personal ini menjadi medium penting bagi terbentuknya kedekatan emosional, patronase, dan loyalitas intelektual. Dengan demikian, otoritas ilmiah kolonial tidak hanya dilembagakan melalui universitas atau kebijakan negara, tetapi juga dirawat melalui jaringan personal yang melampaui batas geografis antara Eropa dan Hindia Belanda.

Adapun terkait keputusan Hoesein untuk beralih dari jalur akademik menuju birokrasi kolonial, Snouck pada dasarnya menerimanya secara pragmatis, meskipun penerimaan itu tetap mengandung negosiasi dan ambivalensi. Di satu sisi, perpindahan tersebut dapat dibaca sebagai keberhasilan pendidikan kolonial dalam menyalurkan elite pribumi terdidik ke dalam struktur pemerintahan. Di sisi lain, peralihan itu menunjukkan bahwa proyek kolonial tidak sepenuhnya mampu mengendalikan arah aktualisasi intelektual subjek yang dibinanya. Hoesein tidak hadir sebagai figur yang sepenuhnya pasif, melainkan sebagai aktor yang bergerak dalam medan pilihan yang kompleks antara loyalitas, ambisi pribadi, dan peluang struktural. Oleh karena itu, kolonialisme berbasis pengetahuan perlu dipahami sebagai proses dialektis yang mempertautkan ilmu, kekuasaan, patronase, dan pengalaman historis dalam pembentukan elite pribumi modern.

Makna historis Hoesein semakin diperkuat melalui keberadaan patung dada yang dibuat oleh Aart Schonk di *academigebouw* Universitas Leiden dan diresmikan pada tahun 2014 oleh Wakil Presiden RI ke-11, Boediono. Patung tersebut menjadi simbol hubungan Indonesia–Belanda yang tidak hanya dibaca melalui warisan kolonial, tetapi juga melalui pengakuan, dialog, dan rekonsiliasi sejarah atas peran Hoesein sebagai intelektual pribumi penting dalam sejarah keilmuan Indonesia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. 2019. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Yogyakarta: Media Pusindo.
- Alfian, Ibrahim. 1987. Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Asbeck, F. van. 1949. “Paul Scholten and Rechsthogeschool.” Dalam *Gedenkboek: Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs In Indonesië*. Groningen - Jakarta: JB Wolters.
- Bannet, Eve T. 2020. “Travel letters: eighteenth-century correspondence from Britain and America.” Dalam *The Routledge research companion to travel writing*, disunting oleh Alasdair Pettinger dan Tim Youngs, 115–27. London: Routledge.
- Bhabha, Homi K. 2004. *The Location of Culture*. Routledge Classics. London ; New York: Routledge.
- Buana, Muhammad. 2015. “Indonesian Indigenous Law Graduates From Leiden University’s Involvement In Colonial Legal System During The 20th Century Late Colonial Period.” BA Thesis, Leiden.
- Burhanudin, Jajat. 2014. “The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 52 (1): 25–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.25-58>.

- Carey, Peter. 2022. "Raden Saleh Syarif Bustaman (circa 1811-1880) and the Java War (1825-30): A Dissident Family History." *Archipel* 103 (2022): 87–126. <https://doi.org/10.4000/archipel.2927>.
- . 1982. "Raden Saleh, Dipanagara and the Painting of the Capture of Dipanagara at Magelang (28 March 1830)." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 55 (1): 1–25.
- Chambert-Loir, Henri. 2013. *Naik Haji di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji*. Vol. 1. Jakarta: KPG.
- De Nieuwe Courant. 1914. "De Graven der eerste vijf Sultans van Atjeh." *Bag.* 164. 15 Juni 1914. 14 ed.
- Dijk, Kees van. 2022. "The Scholar and the War-Horse. The Aceh War, Snouck Hurgronje, and Van Heutsz." *Dalam Scholarship in Action: Essays on the Life and Work of Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)*, oleh Léon Buskens, Jan Just Witkam, dan Annemarie Van Sandwijk. Leiden: Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004513617>.
- Djajadiningrat, Achmad. 1927. "Een Stuk van den Arbeid van Prof. Snouck Hurgronje in het Belang van de Intellectueele Ontwikkeling van het Indonesische Volk." *Djawa (Solo)*, 1927.
- . 1936. *Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Djajadiningrat, H. 1911a. "Critisch Overzicht Van De In Maleische Werken Vervatte Gegevens Over De Geschiedenis Van Het Soeltanaat Van Atjeh I." *Bijdragen tot de taal-, land- en Volkenkunde* 65 (1): 135–211.
- . 1911b. "Critisch Overzicht Van De In Maleische Werken Vervatte Gegevens Over De Geschiedenis Van Het Soeltanaat Van Atjeh II." *Bijdragen tot de taal-, land- en Volkenkunde* 65 (1): 212–17.
- . 1911c. "Critisch Overzicht Van De In Maleische Werken Vervatte Gegevens Over De Geschiedenis Van Het Soeltanaat Van Atjeh III." *Bijdragen tot de taal-, land- en Volkenkunde* 65 (1): 218–65.
- . 1913. "Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage Ter Kenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving." PhD-Thesis, Aan de Rijk-Universiteit Te Leiden.
- . "Hoesein Djajadiningrat Kepada Snouck Hurgronje", 7 Oktober 1913. Surat Personal.
- . "Hoesein Djajadiningrat Kepada Snouck Hurgronje", 20 Oktober 1913. Surat Personal.
- . "Hoesein Djajadiningrat kepada Mangkoenagoro VII", 24 Januari 1920. Surat Personal.
- . "Hoesein Djajadiningrat kepada Snouck Hurgronje", 10 Desember 1920. Surat Personal.
- . 1924. "De Namen Prangwadono En Mangkoenagoro." *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut* 4 (1924): 1–5.

- . 1927a. *Een Verzoek Om Een Mohammedaansch Wetgeleerd Oordel Over de Javaansche Gana-Gini Adat.* (Solo), 1927.
- . 1927b. Jean Pierre Moquette (5 Juli 1856-26 Februari 1927). *Weltevreden: Albrecht & Co.*
- . 1934. *Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek.* Batavia: Landsdrukkerij.
- . 1995. "Tradisi Lokal dalam Sejarah Indonesia." *Dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, oleh Soedjatmoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon. 1993. "Noto Soeroto: His Ideas and the Late Colonial Intellectual Climate." *Indonesia* 55 (1993): 41. <https://doi.org/10.2307/3351086>.
- Djalins, Upik. 2020. "Paul Scholten and the Founding of the Batavia Rechtshogeschool." *Digital Paul Scholten Project 1* (2020): 160–96.
- Fakih, F. 2012. "Conservative corporatist: Nationalist thoughts of aristocrats The ideas of Soetatmo Soeriokoesoemo and Noto Soeroto." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 168 (4): 420–44.
- . 2014. "Akar-akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesejarahannya." *Lembaran Sejarah* 11 (1): 37–49.
- Fanon, F. 1964. *A Dying Colonialism.* New York: Grove Press.
- Fauzi, Kiki Rizki, Erlina Wiyanarti, dan Iing Yulianti. 2023. "Java Instituut: Implementasi Intelektual Lokal dan Kolonial dalam Memajukan Kebudayaan Sunda (1921-1941)." *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 12 (2023): 219–32.
- Foucault, Michael. 1972. *The Archeology of Knowledge & Discourse on Language.* New York: Pantheon Books.
- Gericke, Johann Friedrich Carl, dan Taco Roorda. 1886. *Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek.* With A. C. Vreede. Amsterdam: Johannes Muller.
- Goss, Andrew. 2011. *The Floracrats: State-Sponsored Science and the Failure of Enlightenment in Indonesia.* Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Gouda, Frances. 1993. "Nyonyas on the Colonial Divide: White Women in the Dutch East Indies, 1900–1942.*." *Gender & History* 5 (3): 318–42. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0424.1993.tb00183.x>.
- Grijns, C. D. 1996. "Van Der Tuuk and the Study of Malay." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 152 (3): 353–81. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003004>.
- Groeneboer, Kees. 1993. *Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indie 1600-1950; Een Taalpolitieke Geschiedenis.* Leiden: KITLV.

- . 1999. “Politik Bahasa Pada Masa Hindia Belanda.” *Wacana* 1 (1).
- . 2002. “Herman Neubronner Van der Tuuk and Nineteenth-Century Language Study in Southeast Asia.” *Kekal Abadi* 21 (2).
- Guillot, Claude. 2008. *Banten - Sejarah dan Peradaban Abad X - XVII*. Jakarta: KPG.
- Haji, Raja Ali. 1986. *Kitab Pengetahuan Bahasa: yaitu kamus logat Melayu Johor Pahang Riau Lingga*. Pekanbaru: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hurgronje, S. 2007. *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning. The Moslems of the East-Indian Archipelago*. Leiden: E.J. Brill.
- Jahroni, J. 1999. “The life and mystical thought of Haji Hasan Mustafa (1852–1930).” MA Thesis, Leiden.
- Kaptein, Nico J. 1997. “Sayyid Uthmân on the legal validity of documentary evidence.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 153 (1): 85–102.
- . 1998. “The Sayyid Uthman and The Queen: Sayyid 'Uthman on Queen Wilhelmina's Inauguration The Throne of The Netherlands in 1898.” *Journal of Islamic Studies* 9 (2): 158–77.
- . 2014. *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies*. Leiden: Brill.
- Kartodirdjo, S. 1966. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. Leiden: Nijhoff.
- Kern, H. 1976. “Taco Roorda.” *Dalam Honderd jaar Studie van Indonesie 1850-1950: Levensbeschrijvingen van Twaalf Nederlandse Onderzoekers*. Den Haag: Smith.
- Klinken, Gerry van. 2025. *Menuju Modernitas: Politik Antikolonial 5 Tokoh Minoritas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kloos, David. 2013. “Becoming better Muslims Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia.” PhD-Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.
- . 2021. “Dis/Connection: Violence, Religion, and Geographic Imaginings in Aceh and Colonial Indonesia, 1890s–1920s.” *Itinerario* 45 (3): 389–412. <https://doi.org/10.1017/S0165115321000255>.
- Kuitenbrouwer, Maarten. 2013. *Dutch Scholarship in the Age of Empire and Beyond*. Disunting oleh Harry A. Poeze. Diterjemahkan oleh Lorri Granger. Leiden: Brill.
- . 1986. “Aristocracies under Colonial Rule: North India and Java.” *Dalam Two Colonial Empires*, oleh C. A. Bayly dan D. H. A. Kolff, 75–94. Dordrecht/ Boston/ Lancaster: Martinus Nijhoff.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Kurnia, Atep. 2021. "Het Soendaneesch Vereischte Bahasa Sunda bagi para Pegawai Perkebunan di Priangan, 1890-1928." *Lopian: Jurnal Pengetahuan Lokal* 1 (2).
- Laffan, M. F. 1999. "Raden Aboe Bakar; An Introductory Note Concerning Snouck Hurgronje's Informant in Jeddah (1884-1912)." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 155 (4): 517-42. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003860>.
- . 2003. "Writing from the Colonial Margin: The Letters of Aboe Bakar Djajadiningrat to Christiaan Snouck Hurgronje." *Indonesia and the Malay World* 31 (91): 356-80. <https://doi.org/10.1080/1363981042000188646>.
- . 2015. *Sejarah Islam di Nusantara*. Jakarta: Mizan.
- Loomba, Ania. 2005. *Colonialism/Postcolonialism*. London; New York: Routledge. https://archive.org/details/colonialismpostc0000loom_j7v3.
- Lubis, N. H. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- McFate, Montgomery. 2019. "Useful Knowledge: Snouck Hurgronje and Islamic Insurgency in Aceh." *Orbis* 63 (3): 416-39. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.05.005>.
- Millie, J. 2017. "Hasan Mustapa and the Sundanese." *Dalam Hasan Mustapa: ethnicity and Islam in Indonesia*, oleh J. Millie. Clayton: Monash University Publishing.
- Mrázek, Rudolph. 2024. *Amir Sjarifoeddin: Politics and Truth in Indonesia, 1907-1948*. New York: Cornell University Press.
- Perkasa, Adrian. 2025. "The cultural network: Javanese imaginings of Indonesia, 1918-1966." Ph.D Thesis, Leiden University.
- Perret, Daniel. 2018. "Introduction." *Dalam Writing for Eternity: A Survey of Epigraphy in Southeast Asia*, 13-43. Paris: EFEO.
- Pijper, G. F. 1961. "Professor Dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat: 8 December 1886—12 November 1960." *KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies* 117 (4): 401-9.
- Poeze, H. A. 1989. "Indonesians at Leiden University." *Dalam Leiden Oriental Connections 1850-1940*, oleh Willem Otterspeer, 250-79. Leiden: Brill.
- . 1986. In *Het Land van de Overheerser I Indonesiers in Nederland 1600-1950. Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- En Volkenkunde* 100. Dordrecht, Holland; Cinnaminson, U.S.A: Foris.
- Razy, M.R.O.A.. 2025. "Between Empire and Revelation: Hoesein Djajadiningrat and the Politics of Islamic Knowledge in Dutch East Indies." *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 15 (1): 60-69.
- . 2023. "Hoesein Djajadiningrat: Orientalisme seorang Oriental (1911-1960)." Universitas

Padjadjaran.

- Razy, M.R.O.A., Muhammad Miqdad Rojab Munigar, dan Tarunasena Ma'mur. 2024. "Ambivalensi Birokrat Hindia Belanda: Studi Kasus Visi Hasan Mustapa Akhir Abad XIX." *Metahumaniora* 14 (2): 101–10. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v14i2.56562>.
- Razy, M.R.O.A., K. Sofianto, dan G. A. Jaelani. 2022. "Visi Orientalisme Hoesein Djajadiningrat Dalam Ilmu Pengetahuan dan Pemajuan Identitas Kebudayaan (1911-1960)." *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 5 (2): 97–108.
- . 2023. "Discourse Of Islamization In Indonesia: Hoesein Djajadiningrat's Vision In The Colonial And Postcolonial Periods." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 12 (1): 108–22.
- Reid, Anthony. 2010. "War, Peace and the Burden of History in Aceh." *Asian Ethnicity* 5 (3): 301–14.
- Reid, Anthony, dan D. Marr. 1983. *Jejak Nasionalis Indonesia Mencari Masa Lampauya: Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka*. Jakarta: Grafiti.
- Resink, G. J. 1974. "Rechtshoogeschool, Jongereneed, 'Stuw' En Gestuwden." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 4 (1974): 428–49.
- Rigg, Jonathan. 1862. *A Dictionary of the Sundanese Language of Java*. Batavia: Lange&Co.
- Rizki, Muh., Yusdani Yusdani, Hamidullah Marazi, dan Rahmawati Rahmawati. 2024. "Raja Ali Haji's Philanthropic Thought: The Role of Culture and Language in the Formation of Urban Malay Identity." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 29 (1): 49. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.8796>.
- Rohmana, J.A. 2021. "Colonial informants and the Acehnese-Dutch war Haji Hasan Mustapa's response to Teuku Umar's collaboration with the Dutch authorities in the East Indies." *Indonesia and the Malay World* 49 (143): 63–81.
- . 2016. "Persahabatan Penjajah dan Bangsa Jajahan di Hindia Belanda: C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustapa." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12 (2): 144–68. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2016.0060.144-168>.
- Said, E. W. 2012. *Orientalisme*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Scalliet, Marie-Odetta. 2008. "L'aventure du relevé des vestiges islamiques de Pasai." Dalam *Les monuments funéraires et l'histoire du Sultanat de Pasai à Sumatra*, 391–402. Paris: Association Archipel (Cahiers d'Archipel 37).
- Shatanawi, Mirjam. 2022. "Making and unmaking Indonesian Islam: Legacies of colonialism in museums." PhD-Thesis, University of Amsterdam.
- Singgih, Roswita Pamoentjak. 1985. *Partini: Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunegaran*. Bandung: Penerbit Djambatan.

- Sjamsuddin, H. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Stoler, Ann Laura. 2009. *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton: Princeton University Press.
- . 2002. “Colonial Archives and the Arts of Governance.” *Archival Science* 2 (1–2): 87–109. <https://doi.org/10.1007/BF02435632>.
- Suminto, H. A. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Supardi, Nunus. 2013. *Bianglala budaya: rekam jejak 95 tahun Kongres Kebudayaan, 1918-2013. With Indonesia. Kongres Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryadi, Surya. 2023. *Baginda Dahlan Abdoellah: Konteks Sejarah dan Kisah Hidup Hulpleraar Bahasa Melayu Pertama di Universiteit Leiden dan Aktivistis Perhimpunan Hindia*. Yogyakarta & Medan: Gre Publishing & UMSU Press.
- Sutanto, Sutopo. 1983. *Prof. Husein Jayadiningrat: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutherland, Heather. 2021. *Politik Dinasti Keluarga Elit Jawa XV-XX*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suwignyo, Agus. 2012. “The Breach In The Dike : Regime Change And The Standardization Of Public Primary-School Teacher Training In Indonesia, 1893-1969.” PhD-Thesis, Leiden University.
- . 2013. “The Great Depression and the Changing Trajectory of Public Education Policy in Indonesia, 1930–42.” *Journal of Southeast Asian Studies* 44 (3): 465–89. <https://doi.org/10.1017/S0022463413000337>.
- Teeuw, A. 1996. “Van Der Tuuk as Lexicographer.” *Archipel* 51 (1): 113–33. <https://doi.org/10.3406/arch.1996.1097>.
- Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Van den Doel, Wim. 2023. *SNOUCK: Biografi Ilmuwan Christiaan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Jakarta.
- Van der Tuuk, N. 1897. *Kawi-Balinesesch-Nederlandsch Woordenboek*. Batavia: Landsdrukkerij.
- . 1861. *Bataksch Nederduitsch Woordenboek*. Amsterdam: Frederick Muller.
- Van Mook, H. J. 1944. *Beschouwing van Van Mook ter nagedachtenis van Raden Loekman Djajadiningrat*. 24 Juli 1944.
- Veth, P. J. 1873. *Atjeh en zijne betrekkingen tot Nederland*. Leiden: Brill. <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/50830>.

